



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

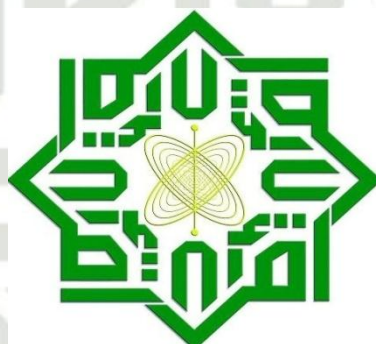
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN
2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN, DI DANAU
PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIKI ADITIA SINTANA
NIM. 11527100055

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN
2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN, DI DANAU
PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR**

SKRIPSI

Di Ajukan untuk Memenuhi Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIKI ADITIA SINTANA
NIM. 11527100055

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN, DI DANAU PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR*, yang ditulis oleh :

Nama : **Riki Aditia Sintana**
 NIM : 11527100055
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 27 Desember 2019
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Januari 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, SH., MH

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

(NIP. 19580712 198603 1 005)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© F

Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, Di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar"*

Nama : RIKI ADITIA SINTANA

NIM : 11527100055

Program Studi : Ilmu Hukum (HTN)

Dapat diterima dan di setujui untuk di ujiankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Desember 2019

Pembimbing skripsi

NUR HIDAYAT, S.H., M.H

NIK. 13020308



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

NUR HIDAYAT, S.H., M.H

Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Sultan Sarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Desember 2019

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Riki Aditia Sintana

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setela membaca dan memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara RIKI ADITIA SINTANA yang berjudul “ **PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG BERDASARKAN PERATRAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN, DI DANAU PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR** ” dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dengan waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diajukan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Sarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wasala'mualaikum wr. Wb

Pembimbing

NUR HIDAYAT, S.H., M.H
NIK. 1302038



ABSTRAK

Riki Aditia Sintana (2019): “PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN, DI DANAU PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.”

Perizinan di dalam suatu usaha sangatlah penting sekali, baik itu di bidang usaha daratan maupun perairan. Usaha pompong di Danau PLTA Koto Panjang merupakan usaha yang bergerak di bidang transportasi perairan, berdasarkan observasi dari penulis di lapangan terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dan fakta di lapangan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. Namun para pengusaha pompong di Danau PLTA koto Panjang belum memiliki izin yang di urus melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten kampar. Penelitian ini membahas tentang cara memperoleh perizinan usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan serta faktor-faktor penghambat perizinan dalam usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Jenis penelitian hukum sosiogis (Yuridis Sosiologis), sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini langsung ke lokasi pada Pengusaha Pompong Di Danau PLTA Koto Panjang dan kemudian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPM-PTSP), kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini tentang pelaksanaan perizinan usaha pengoperasian pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar masih tidak sesuai antara Peraturan dengan pelaksanaan di lapangan, dikarenakan usaha pompong di Danau PLTA Koto Panjang tidak memiliki izin usaha dalam pengoperasiannya yang sebagaimana di atur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, hal ini dikarenakan ada 4 faktor yang menyebabkan tidak memiliki izin : Pertama, Kurangnya sosialisasi cara mendapatkan perizinan usaha pompong di danau PLTA Koto Panjang, Kedua, Proses dalam mendapatkan perizinan, Ketiga, Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan Keempat, Kurangnya sanksi dan pengawasan sebagai efek jera bagi para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha. Karna faktor-faktor tersebut maka akan berdampak kepada pajak dan redistribusi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil' alamin, tiada kata yang paling indah selain puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, dengan mengucap *Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaalihi Syaidina Muhammad*, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman unta menuju zaman kereta, sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan syafa'atnya diakhir kelak nanti Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG BERDASAKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN IPERAIRAN, DI DANAU PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Alimin dan Ibunda Muliati, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. terkhususkan untuk sahabat, Al yasir, Sutan muda, Ropi gusnita, Sri Rahayu. dan saudara penulis, Alvis sintiani, sannya nahila, hesti wilanda yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin , M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar,M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr, H.Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau,yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan .
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim,S.Ag,S.H,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya
5. Bapak Nur Hidayat SH., MH. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Asril S.HI, S.H,M.H selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

8. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru 03 Desember 2019
Penulis

RIKI ADITIA SINTTANA
11527100055

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Kampar.....	19
1. Sejarah Kabupaten Kampar	19
2. Geografi Kabupaten Kampar	20
3. Visi dan Misi	21
4. Pemerintahan	22
5. Dermrografi.....	24
6. Perekonomian	24
B. Sejarah Singkat Kecamatan XIII Koto Kampar.....	25
1. Letak Geografis	26
2. Demografi Kecamatan.....	26
C. Sejarah Berdirinya Danau PLTA Koto Panjang	30
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Hukum Administrasi Negara.....	33
B. Hukum Pajak Dan Restribusi	40
C. Transportasi	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

- Cara Memperoleh Perizinan Usaha Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. 50
- Faktor-Faktor Penghambat Perizinan Usaha Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan..... 54

BAB V PENUTUP

- Kesimpulan 66
- Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel	13
Tabel II. 1 Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Kampar	22
Tabel III. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan XIII Koto Kampar	26
Tabel IV. 1 Jumlah Persukuan Di Kecamatan XIII Koto Kampar	26
Tabel V. 1 Jenis Mata Pencaharian Di Kecamatan XIII Koto Kampar	27
Tabel VI. 1 Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke 4 yang berbunyi kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia”¹. Dari pembukaan diatas dapat dipahami bahwa tentang kesejahteraan umum yang memiliki arti sebagai kondisi yang dibutuhkan semua orang tanpa terkecuali, maka merupakan tanggung jawab Negara untuk menyediakan kesejahteraan umum.

Negara harus menjamin berbagai kebutuhan semua kebutuhan Negara seperti kebutuhan ekonomi, perlindungan HAM, pendidikan, kesehatan maupun hukum. Berbicara tentang hukum, Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”², konsepsi Negara hukum yang dulu dilaksanakan menganut *rechtsstaat* sekarang dinetralkan menjadi Negara hukum saja, tanpa label *rechtsstaat* yang diletakan di dalam kurung. Dengan demikian, Negara hukum menganut unsur-unsur yang baik dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Dulu, ini ditegaskan di dalam penjelasan UUD dengan kalimat “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas

¹ Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, alenia ke 4

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja, tanpa lebel *rechtsstaat* yang diletakan di dalam kurung. Dengan demikian, negara hukum menganut unsur-unsur yang baik dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Dulu, ini ditegaskan di dalam penjelasan UUD dengan kalimat “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). “namun sekarang penjelasan UUD tidak berlaku dan pernyataan prinsip negara hukum itu penuanganya di dalam konstitusi di pindahkan kedalam Pasal 1 ayat (3) dengan kalimat yang netral yaitu Negara Indonesia adalah Negara Hukum.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (12) mengatakan bahwa: Daerah Otonom yang selanjudnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilaya yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut perkara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indoneia.⁴

Jimly Asshiddiqie mengatakan di dalam bukunya bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang di tiap-tiap Provinsi Kabupaten dan Kota itu memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur di dalam Undang-Undang,⁵ Pemerintahan Daerah Provinsi mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

³ Mahfud Md, Perdebatan Hukum Tata Negara, (jakarta, rajawali perss, 2010), h.

⁴ Undang-Undang Negara Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Jimy Asshiddiqie, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cakupan wilayah hukum ialah seluruh wilayah suatu Negara tersebut, begitu juga di Indonesia wilayah keberlakuan hukumnya yaitu diseluruh wilayah Indonesia, baik itu didaratan, lautan maupun diudara. Indonesia dikenal sebagai Negara maritim, dengan konsep geologinya yaitu 2/3 wilayahnya terdiri atas perairan, dengan keindahan alam ini maka ini memberikan sumbangan terhadap konsep perekonomian bangsa dan Negara Indonesia, seperti perikanan, transportasi dan pariwisata. Setiap sektor tersebut memberikan sumbangan terhadap masyarakat-masyarakat yang beradah disekitar wilayah perairan tersebut yaitu dengan cara menjadikan mata pencaharian di wilayah tersebut. Wilayah tersebut seperti laut, danau, sungai, dan lain2.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang beradah di Provinsi Riau, yang memiliki wilayah yang cukup besar dan dialirih oleh aliran sungai Kampar, masyarakat yang beradah dipesisir sungai Kampar juga memamfaat kan sungai tersebut sebagai sumber kehidupan, Kecamatan XIII Koto Kampar adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar.⁶ Jarak lokasi Kecamatan XIII Koto Kampar dari Kota Kabupaten yaitu Kota Bangkinang Berjarak kurang lebih 36 KM, sedangkan jarak Kecamatan XIII Koto Kampar dengan Kota Pekanbaru berjarak kurang lebih 100 KM, .Kecamatan XIII Koto Kampar juga memiliki beberapa objek wisata yang sangat membanggakan Kecamatan tersebut dan mempunyai danau yaitu danau PLTA Koto Panjang.

⁶ Hernimawati dan Sudaryanto, *Peran Pemimpin dalam pelayanan publik di Kantor Camat XIII Koto Kampar Kabupaten Kmpar*,(Pekanbaru, Jurnal Niara, Vol.10 No.2Januari 2018), h.97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut salah satu pemuka adat Desa Tanjung Alai bapak Kidam beliau mengatakan bahwa Kecamatan XIII Koto Kampar dahulunya belum dimasuki oleh aliran listrik, namun setelah di dirikanya bendungan dam PLTA Koto Panjang, maka mulailah dialiri oleh aliran listrik, sebelum terbentuknya danau PLTA Koto panjang, danau tersebut merupakan sebuah sungai atau sering di sebut dengan sungai kampau.⁷

Danau PLTA koto Panjang merupakan danau dimana terjadinya karena pembuatan dam PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) pada Tahun 1993 berkat kerjasama Negara Indonesia dengan Negara Jepang. yang berlokasi di antara perbatasan Kecamatan XIII Koto Kampar dengan Kecamatan Kuok, berkapasitas 114 mw, tinggi bendungan 58 meter yang akan menenggelamkan 12 desa, menenggelamkan 2. 6444 rumah, 8. 989 hektar kebun-sawah, Jalan Negara 25,3 KM dan Jalan Provinsi 27,2 yang bakalan di tenggelamkan.⁸

Danau PLTA ini memiliki kedalaman yang cukup memadai dan cukup luas sehingga banyaknya tercipta lapangan pekerjaan baik itu di bidang objek wisata, spot pemancingan, sehingga masyarakat setempat memanfaatkan danau PLTA tersebut untuk membantu mata pencaharian, baik berupa mata pencaharian seperti nelayan dan juga pariwisata dan transpor air, dimana semuanya memberikan masukan dan pendapatan dalam kehidupan ekonomi.

Dari semua usaha tersebut salah satu yang menjadi sangat penting adalah bagian transportasi. Tansportasi adalah sebagai dasar pembangunan

⁷Kidam, Pemuka Adat Desa Tanjung Alai,(wawancara)30 April 2019.

⁸[http://www. PLTAkotoPanjang.net/wikipedia/diaksestanggal](http://www.PLTAkotoPanjang.net/wikipedia/diaksestanggal) 1 mei 2019, (jam06.23)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ekonomi dan pembangunan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi.⁹ Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian kerja menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. Perkembangan suatu ekonomi suatu Negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam Negara atau bangsa yang bersangkutan.

Salah satu fungsi dari transportasi yaitu untuk mengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung bagi fungsi kegunaan seseorang, seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.¹⁰

Dimana salah satu usaha transportasi yang berada di danau PLTA Koto Panjang adalah usaha pompong, usaha pompong ini merupakan usaha yang sangat cocok dengan keadaan yang berada di danau PLTA Koto Panjang ini dikarenakan danau ini memiliki potensi yang mengiurkan baik itu di bidang pariwisata dibidang perekonomian maupun di bidang perikanan dan yang paling penting di bidang transportasi air.

Definisi *gross tonnage* (GT) menurut PP N0. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, *tonase* kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan Volume Kapal. Jika di setarakan dengan kubik maka disamakan dengan 2,83 m³. Berdasarkan klasifikasi standar kapal yang seharusnya memiliki izin yaitu: menurut standar kapal/pompong nelayan dengan panjang keseluruhan sekitar 9 M,

⁹Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta, Grafinda Persada, 2016), h. 6

¹⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan lebarnya 3 M, dan panjang palkanya sekitar 2 M (ruang kapal), dan tingginya 2 M, berdasarkan observasi peneliti di lapangan, kapal/pompong yang berda di kawasan danau PLTA Koto Panjang memiliki panjang sekitar lebih kurang 10 M dan lebarnya lebih kurang 4 M. Dan bisa mengangkut penumpang sebanyak 15 orang¹¹

tujuan masyarakat dalam berusaha pompong ialah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan sebagai mata pencharian, dan juga sebagai alat transportasi unuk menuju ojek wisata. Dalam usaha pompong tersebut perlu adanya perizinan. Dalam jasa angkutan dalam hal ini yaitu jasa angkutan pompong yang beradah didanau PLTA Koto Panjang, juga termasuk kedalam dalam bentuk usaha. Setiap usaha harus memiliki izin sesuai dengan konsep perizinan

Izin adalah perbuatan hukum Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan undang-undang. menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untudk memperloeh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum.

Dan perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah bisa diterapkan sebagai salah satu kewenangan yang ditentukan Pemerintah Daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum Kepala Daerah, baik atas dasar peraturan perundang

¹¹ Edy Haryanto, *penetapan bentuk kapal nelayan di perairan selat malaka*, Jurnal Inovtek Polbeng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang dijadikan landasnya, maupun dalam rangka menyikapi prinsip Pemeritahan yang layak sebagai bentuk tanggung jawab publik.¹²

Berdasarkan unsur perizinan izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk di terapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tetentu. dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan. yaitu, instrumen yuridis, peraturan organ pemerintah, peristiwa kongkret, prosedur dan persyaratan.¹³

Dari depinisi perizinan maka dapat dipahami dalam suatu usaha, dan untuk menjalankan usaha tersebut perlu adanya suatu perizinan yang nantinya menjadi payung hukum dan legalitas yang di ketahui oleh Pemerintah selaku pihak yang menjalan kan administrasi. Usaha pompong didanau PLTA Koto Panjang juga harus memiliki izin dalam menjalankan usaha pompong, hal ini di sebabkan usaha pompong tersebut sudah cukup luas cakupan dari obyeknya di dalam transportasi untuk pariwisata didanau PLTA Koto Panjang. Suatu tujuan dari prizinan adalah mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum adalah salah satu istilah yang banya di perdengarkan kalangan masyarakat umum, kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, apa yang menurut hukum boleh atau tidaknya.¹⁴

¹²Ridwan Jniarso, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung, Nuansa, 2012), h. 99.

¹³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta :PT Raja Grapindo Parsada:2006), h. .

21.

¹⁴Donald Albert Rumoky, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Perss : 2014) , h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.¹⁵

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

A. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

B. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

1. Untuk adanya kepastian hukum.
2. Untuk adanya kepastian hak.

¹⁵Elvy Urmilasari, Arti Penting Perizinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Makasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan

Undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.¹⁶

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa :

- a. Mengendalikan perilaku warga
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c. Melindungi objek-objek tertentu
- d. Membagi sumber daya yang terbatas
- e. Mengarahkan aktivitas

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

- a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

- b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum dipermerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak

¹⁶*ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut penetapan izin tersebut menjadi tidak sah.¹⁷

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, setiap usaha baik itu usaha pemompaan yang berada di danau PLTA Koto Panjang juga harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah daerah, dan mengikuti prosedur perizinan dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 93 yaitu: terdapat empat jenis macam izin usaha angkutan di perairan: izin usaha angkutan laut, izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat, izin usaha angkutan sungai dan danau, dan izin usaha angkutan penyebrangan.¹⁸

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.¹⁹

Berbicara tentang pelaksanaan hukum maka kita menghadapi bagaimanakah hukum tersebut berada dimasyarakat. Hal ini berkaitan dengan kajian sosiologi hukum yaitu berbicara tentang struktur sosial di masyarakat dan lebih lanjut dikatakan gejala-gejala sosial yang dimaksud ruang

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkupna memasuki struktur sosial proses sosial.²⁰ Di danau PLTA Koto Panjang juga berkaitan dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psiko yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian,²¹ jelaslah bahwa kesadaran hukum merupakan dasar bagi proses penegakan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, setiap usaha yang bergerak di bidang izin usaha angkutan diperairan harus memiliki izin dalam pengoperasiannya. Tetapi kenyataan di lapangan usaha pompong yang berada di danau PLTA Koto Panjang tidak memiliki izin dalam pengoperasiannya.

Hal inilah yang mendasari penulis mengambil pokok permasalahan mengenai perizinan usaha pompong di danau PLTA Koto Panjang yang di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, dalam bentuk tulisan yang berjudul **PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN DI DANAU PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII KOTO KAMAR**”.

²⁰Lisa Angraini, *Pengantar Ilmu Hukum*, (pekanbaru: suska press 2014), h. 160.

²¹Ibid h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan, maka penulis akan membatasi permasalahan ini yakni berfokuskan kepada perizinan usaha pengoperasian pompong di danau PLTA Koto Panjang, Kecamatan XIII Koto Kampar.

D. Rumusan Masalah

Berhubungan dengan latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memperoleh perizinan dalam usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan ?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat perizinan dalam usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana cara memperoleh perizinan dalam kegiatan usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
 - b. Untuk mengetahui Apakah faktor-faktor penghambat perizinan dalam kegiatan usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang perizinan dalam kegiatan usaha pompong di danau PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang berlayu di lapangan

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yang penulis ambil ialah di danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi alasan penulis ialah melakukan penelitian pada danau PLTA Koto Panjang karena banyaknya usaha pompong yang tidak memiliki izin usaha dalam melakukan pengoperasiannya.

3. Populasi dan Sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama²². Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah *purposif sampling*, yaitu antara populasi dan sampel berbeda.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1	Pengusaha Pompong Di Danau PLTA Koto Panjang	25	7	35%
2	Kepalah Dinas perizinan (DPM-PTSP)	1	1	100%
	Pegawai Dinas Perizinan (DPM-PTSP)	10	4	40%
Jumlah		36	12	

4. Sumber Data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis data yaitu:

- Data primer adalah data yang didapatkan dari narasumber baik dari kelompok maupun perorangan, baik dilakukan dengan metode pengamatan(*observasi*), maupun wawancara langsung dengan Pengusaha Pompong Di Danau PLTA Koto Panjang, Kepala Dinas Penanaman Modal

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan Para Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan keputusan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah dan materi peneltihan atau yang sering disebut dengan bahan hukum.²³ Data berupa bahan-bahan pustaka, misalnya buk–buku, undang-undang , peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum dalam peneltihan berupa berbagai literatur yang dikelompokan ke dalam:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Tentang Angkutan Perairan, Pemerintahan Daerah yurisprudensi Seperti Pendapat Parra Ahli Hukum atau keputusan pengadilan dan perjajian internasional.²⁴

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, Seperti Buku HAN, Perizinan, Pajak dan redistribusi, Transportasi,, jurnal hukum, surat kabar (koran), pamflet, *lefleat*, brosur, dan berita internet.²⁵

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, *Dualise Penelitian Hukum Normaif Dan Emfiris*, Yogyakarta, pustaa fajar, 2010) h. 156

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain lain.²⁶

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang di pakai dalam melakukan pengumpulan data adalah:

a. Pengamatan (*Obserpasi*)

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghipun data penelitian, sehingga data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti, atau dengan kata lain data-data tersebut di himpun melalui pengamatan panca indra (lapangan) bagaimana Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, Di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar.

b. wawancara

adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka , ketika seseorang , yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang diancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden ²⁷.

c. Kajian Pustaka

²⁶*Ibid*

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu mempelajari buku-buku, jurnal dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Dokumentasi

yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

6. Analisis Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif yang merupakan cara menghasilkan penelitian deskriptif yaitu segala hal yang di nyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan serta mengamati perilaku subjek yang di teliti.²⁸ Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yang me nararik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang berifat umum.²⁹

Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi ini ialah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Btasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

²⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), cet. Ke-12, h. 32

²⁹ Alim Arsyd, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, (Pekanbaru, UNRI Press, 2005), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Daerah Kabupaten Kampar, Sejarah kecamatan XIII Koto Kampar, sejarah Berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Air Koto Panjang Kabupaten Kampar, letak geografis.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori Hukum Administrasi Negara, tinjauan umum Teori hukum pajak, Teori transportasi, tinjauan umum usaha pompong di danau PLTA Koto panjang kecamatan XIII Koto kampar.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdidri atas cara memper oleh perizinan dalam pengoperasian usaha pompong berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentag Angkutan Di Perairan dan faktor-faktor pengahambat perizinan usaha pompong.

BAB V : PENUTUP

Yaitu berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten Di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan bumi sarimadu, Kabupaten yang beribukota Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan serambi mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km atau 12.26% dari luas Propinsi Riau.

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sungai besar, yang disebut sungai Kampar. Berkaitan dengan prasasti kedudukan bukit, beberapa sejarawan menafsirkan minangah tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang di asumsikan pertemuan sungai Kampar Kanan dengan sungai Kapar Kiri. Pertemuan ini didukung dengan pertemuan candi muara takus di tepian sungai Kampar Kanan, yang telah dipercayai telah ada pada masa kerajaan sriwijaya.³⁰

Berdasarkan silalatus salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar, kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah, setelah jatunya bintang tahun 1526 ketangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minang Kabau.

³⁰ Soekmono, R, (1973 5th Reprint Edition In 1988), *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia* 2, 2nd Ed., Yogyakarta: Penerbit Kenisius, ISBN 979-4132290X.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Geografi Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua (2) sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya sungai Kampar yang panjangnya lebih kurang 413,5 km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri, sungai-sungai besar yang terdapat Kabupaten Kampar sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 h merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" lintang utara sampai 00027'00" bujur timur. Batas-batas Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kota Pekanbaru Dan Siak.
2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dengan Kabupaten Rokan Hulu Dan Propinsi Sumatra Barat.
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Plalawan Dan Kabupaten Siak.

Daerah Kabupaten Kampar terdapat dua (2) sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu :

Sungai Kampar yang pajangnya kurang lebih 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam Kabupaten Kampar Yang Meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai Siak bagian Hulu yakni panjangnya kurang lebih 90 km dengan kedalam 8-12 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

3. Visi Dan Misi

Kabupaten Kampar negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamamis Tahun 2020” untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan enam (6) misi Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara menghadapi tantangan sosial.
- b. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan playanan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan.
- d. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terikat antar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala lokal , nasional, maupun internasional.
- e. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara bersikenambungan.
- f. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan taqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat yang tecermin dalam kerukunan hidup beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemerintahan

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor : KPTS.318VIII1987 Tanggal 15 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.³¹ Adapun Kecamatan yang terapat di Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari 21 Kecamatan, sebagai pemekaran dari 12 Kecamatan sebelumnya. Ke 21 Kecamatan tersebut (Beserta Ibu Kota Kecamatan). adalah:

NO	KECAMATAN	IBU KOTA
1.	Bangkinang kota	Bangkinang kota
2.	Kuok	Kuok
3	Bangkinang	Muara Uwai
4.	Gunung Sahilan	Kebun Durian
5.	Kampar	Air Tiris
6.	Kampar Kiri	Lipat Kain

³¹ Unggul Hampir 15 Ribu Suara: *Jefri Noer Bupati Kampar Terpilih*. 15 Oktober 2011. Diakses pada 25 Mei 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Kampar Kiri Hilir	Sei. Pagar
8.	Kampar Kiri Hulu	Gema
9.	Kampar Timur	Kampar
10.	Kampar Utara	Desa Sawah
11.	Perhentian Raja	Pantai Raja
12.	Rumbio Jaya	Teratak
13.	Salo	Salo
14.	Siak Hulu	Siak Hulu
15.	Tambang	Sei. Pinang
16.	Tapung	Petapahan
17.	Tapung Hilir	Pantai Cermin
18.	Tapung Hulu	Sinama Nenek
19..	XIII Koto Kampar	Batu Besurat
20.	Koto Kampar Hulu	Tanjung
21.	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang

5. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tercatat 688, 24 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Penduduk Kampar adalah orang Minang Kabau yang kerap kali menyebut diri mereka sebagai orang Ocu, tersebar di sebagian Wilayah Kampar dengan persukua domo, melayu, piliang, mandailing, putopang, caniago, kampai, bendang dll. Secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minang Kabau.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 33,368 jiwa. Penduduk yang berada di Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, dan diikuti oleh agama Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampir 90% dari seluruh total pemeluk agama yang berada di Kabupaten Kampar

6. Perekonomian

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama dibidang pertanian dan dibidang perikanan, sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja disektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0,22%) yang bekerja di sektor listrik, gas, dan air bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur jaringan, jalan raya, jaringan listrik dengan (5) unit pembangkit tenaga disel, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114.240 KWH. Fasilitas lain yang juga sudah tersedia antara lain layanan telekomunikasi dan jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³.

B. Sejarah Singkat Kecamatan XIII Koto Kampar

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar. Kecamatan XIII Koto Kampar erat kaitannya dengan sejarah budaya Kenegerian di lingkungan Panji Andiko 44 yang ber hukum adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budayanya dari telaga udang di Muara Takus di bawah payung Panji Andiko 44, yang wilayahnya meliputi tiga kabung air (sungai) yaitu, sungai Kampar Kanan, sungai Kampar Kiri dan sungai Rokan.

Angka tiga belas romawi pada nama Kecamatan XIII Koto Kampar membuktikan adanya budaya yang bersejarah di Kecamatan XIII Koto Kampar yaitu Stupa Muara Takus yang terletak di salah satu Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar yaitu Desa Muara Takus, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Palembang.

Kecamatan XIII Koto Kampar dahulunya untuk sementara berpusat di Desa Muara Mahat, kemudian Ibukota Kecamatan dipindahkan setelah transportasi bisa melalui jalan darat. Pada tahun 1990 PLTA Koto Panjang mulai dibangun yang menyebabkan enam Desa dan dua Kelurahan terendam, sehingga lebih dari 4.000 Kepala Keluarga harus dipindahkan melalui program Transmigrasi. Sejalan dengan perkembangan penduduk serta jangkauan pelayanan Pemerintah terjadi pemekaran Desa/Kelurahan sehingga Kecamatan XIII Koto Kampar menjadi delapan belas Desa dan satu Kelurahan. Pada tahun 2008 Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar yang ibukotanya Kelurahan Batu Bersurat dan Kecamatan Koto Kampar Hulu yang ibukotanya Desa Tanjung.

1. Letak Geografis

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar. Pada tahun 2008 Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu kecamatan XIII Koto Kampar yang ibukotanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Batu Bersurat dan Kecamatan Koto Kampar Hulu yang ibukotanya Desa Tanjung.

Secara geografis Kecamatan XIII Koto Kampar sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah $\pm 117.265 \text{ KM}^2$ dengan kepadatan penduduk (5)lima orang , dengan batas-batas sebagai berikut ini:

- Utara : Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu
- Selatan : Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar
- Timur : Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar
- Barat : Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

2. Demografi Kecamatan

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan XIII Koto Kampar pada tahun 2016 berjumlah 25.235 jiwa, terdiri dari laki-laki yang berjumlah 13.056 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 12.179 jiwa. Kecamatan XIII Koto Kampar Pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, Minang, Jawa, dan lain-lain..

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	13.056
2	PEREMPUAN	12.179
	JUMLAH	25.235

Sumber : Kantor Camat XIII Koto Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Kecamatan XIII Koto Kampar berasal dari berbagai suku yaitu meliputi : Melayu, Minang, Batak, Jawa dan Nias. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut :

NO	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	24.468	96,97
2	Minang	325	1,29
3	Batak	86	0,34
4	Jawa	305	1,20
5	Nias	51	0,20
Jumlah		25.235	100 %

Sumber : Kantor Camat XIII Koto Kampar.

b. Mata Pencaharian

Daerah Kecamatan XIII Koto Kampar mempunyai daratan yang luas dan berada dipinggir sungai, Sehingga mata pencaharian penduduknya beraneka ragam. Rata-rata Penduduk XIII Koto Kampar bekerja sebagai Petani, dan Nelayan, sebagian lagi menjadi pedagang, PNS, TNI dan POLRI dan lain-lain.

Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk XIII Koto Kampar, dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	5.320
2	Nelayan	554
3	Pedagang	669

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Buruh	114
5	PNS	250
6	TNI	15
7	POLRI	38
	Jumlah Total	6.960

Sumber : Kantor Camat XIII Koto Kampar.

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas penduduk Kecamatan XIII Koto Kampar mata pencahariannya sebagai petani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Pada umumnya penduduk XIII Koto Kampar bertani karet dan sawit.

c. Pendidikan

Pendidikan masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 10.820 orang. Sedangkan Perguruan Tinggi sebanyak 2.069 orang yang terdiri dari D1 sebanyak 16 orang, D2 sebanyak 117 orang, D3 sebanyak 367 orang, S1 sebanyak 1.554 dan S2 sebanyak 15 orang. Secara umum jumlah penduduk Kecamatan XIII Koto Kampar berdasarkan pendidikan dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak berijazah	2.015	8,00
2	SD	10.820	42,90
3	SMP	5.405	21,41
4	SMA	4.932	19,54
5	D1	10	0,03
6	D2	117	0,46
7	D3	367	1,45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	S1	1.554	6,15
9	S2	15	0,06
	Jumlah	25.235	100 %

Sumber : Kantor Camat XIII Koto Kampar.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa kesadaran masyarakat XIII Koto Kampar terhadap pentingnya pendidikan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari 50,90% masyarakatnya tidak berijazah ataupun hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Pendidikan sangat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, jadi kesadaran masyarakat terhadap pendidikan perlu ditingkatkan.

d. Agama

Penduduk XIII Koto Kampar sebagian besar bersuku melayu. Jadi, secara umum penduduk XIII beragama islam. Akan tetapi ada beberapa pendatang yang pindah ke Kecamatan XII Koto Kampar yang beragama kristen protestan. 99,70% atau (25.157 orang) Penduduk XIII Koto Kampar beragama islam. Sedangkan 0,30% atau (78 orang) Penduduk XIII Koto Kampar yang beragama Kristen Protestan.

C. Sejarah Berdirinya Danau PLTA Koto Panjang

PLTA adalah pembangkit listrik bertenaga air yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. PLTA Koto Panjang atau pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang, merupakan salah satu pembangkit listrik bertenaga air, yang beradiah di Kabupaten Kampar, Riau. PLTA ini menggunakan air sungai Kampar sebagai penggerak turbinya, Namun akibat pembuatan dam PLTA tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan beberapa desa pada kawasan Koto Panjang menjadi terendam, sehingga pemukiman warga tersebut dipindah ke kawasan aman lainnya. PLTA Koto Panjang memiliki kapasitas terpasang 3 x 38 megawatt (114 mw). Pada musim kemarau , kemampuannya menyusut hingga menghasilkan 60 MW. Hal ini diakibatkan terbatasnya debit air sungai tersebut.

Pada bulan September 1979 yaitu bertepatan dimana awal mula perencanaan terbentuknya danau PLTA Koto Panjang yang berawal dari PT PLN yang akan merencanakan pembangunan dalam skala kecil di Tanjung Pauh dalam rangka memanfaatkan potensi Batang Mahat yaitu anak sungai dari Kampar kanan dan di dibulan November TEPSCO (*Tokyo Elektrik Power Servise CO, Ltd*) yaitu sebuah perusahaan dari Jepang yang mengirim tim untuk pencairan proyek (*projeck finding*) ke Sumatra.³²

Dari hasil survey yang dilakukan, TEPSCO mengusulkan pembangunan waduk secara besar, yakni pertemuan antara Kampar Kanan dan Batang Mahat dengan lokasi yang beradiah di Daerah Koto Panjang.

pada tahun 1980 tepatnya pada bulan Maret TEPSCO mempromosikan usulnya kepada Pemerintahan Jepang Dan Pemerintahan Indonesia dan pada bulan Agustus PT tersebut kembali mengirimkan tim penelitian pra studi kelayakan ke dams site, dan hasilnya membuahkan 2 usulan, pertama di bangun bendungan sebanyak 2 buah yang berlokasi di

³²[http://www.PLTAKotoPanjang.net/wikipedia/diaksestanggal 1 mei 2019, \(jam06.23\)](http://www.PLTAKotoPanjang.net/wikipedia/diaksestanggal%201%20mei%202019,%20jam06.23)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Pauh dan Koto Panjang, yang berada di Daerah Koto Panjang akan dibangun bendungan tunggal yang berskala besar.

Pada tahun 1981 yang diperkirakan pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober JICA (*Japan Internasional Cooperation Agency*). menindak lanjuti hasil dari TEPSCO, dan mengirim sebanyak 4 orang yang terdiri dari dua orang konsultan dari perusahaan Hokuden Kogyo LTD dan dua orang dari anggota JICA. Dan pada tahun 1982 JICA melakukan survey penuh berupa studi kelayakan proyek dalam usulan ini. Studi ini juga dalam rangka memperbandingkan rencana bendungan tunggal dengan dua bendungan bertahap.³³

Bendungan tunggal, lokasi di Koto Panjang berkapasitas 114 mw, tinggi bendungan 58 meter yang akan menenggelamkan 12 desa yaitu: Pulau Gadang, Tanjung Alai, Tanjung Pauh, Tanjung Belit, Muara Takus, Lubuk Agung, Batu Barsurat, Pongkai, Koto Tuo, menenggelamkan 2.6444 rumah, 8.989 hektar kebun-sawah, Jalan Negara 25,3 KM dan Jalan Provinsi 27,2 yang bakalan di tenggelamkan. Dan pada tahun 1993 mulai dibangun waduk pembangkit listrik tenaga air tersebut atas kerja sama Indonesia dengan Jepang.

³³*Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Agar permasalahan dalam penelitian ini mudah di pahami, maka perlu tinjauan menurut para ahli maupun teori-teori yang berkenaan dengan penelitian yang diteliti, pembahasan kajian teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

A. Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan Negara didalam menjalankan tugasnya. Terhadap perumusan ini banyak diajukan keberatan-keberatan. Perlu diketahui bahwa Negara suatu pengertian yang abstrak dan berwujud suatu badan hukum. Maka perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat Negara sebagai organ suatu badan hukum sangat heterogen. Tidak hanya perbuatan dalam hukum publik saja, akan tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan dalam hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi negara diartikan sebagai rangkaian - rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.³⁴

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri, hukum administrasi Negara sebagai hubungan yang dilakukan memungkinkan

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus, sehingga didalam hal ini hukum administrasi Negara memiliki dua aspek : Pertama, Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya. Kedua, Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan warga Negeranya.

Hukum tata usaha Negara yaitu hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas, kearsipan, dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rukjuk publikasi dan penerbitan-penerbitan Negara.³⁵

Ada tiga (3) komponen Dalam Hukum Administrasi Negara untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Regeling

Merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu aturan yang bersifat umum, abstrak pengaturan yang dimaksud dapat berupa undang-undang, pengaturan pemerintah, pengaturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah dan lembaga legislatif ataupun pemerintah itu sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regling ini dimaksud dengan tugas hukum yang di ibahkan pemerintah dengan menerbitkan peratura-peraturan yang bersifat umum, yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat Tata

³⁵Abdoel Djamali, Penghantar Hukum Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009) h.89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus.

2. Freies ermeszen

Secara bahasa freies ermeszen bersal dari kata frei yang artinya bebas lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu ermeszen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan, sehingga dapat dikatakan bahwa freies ermessem berarti orang yang memiliki kebebasan untuk, menilai, menduga, dan mempertimbangkan suatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang diberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat dengan sepenuhnya dengan Undang-undang.³⁶

3. Beschiking

Pengertian ketetapan berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang PTUN, yaitu suatu penetapan penulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan pinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi atau badan hukum perdata, keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan hampir semua organ pemerintah berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan.³⁷

Macam-macam keputusan tata usaha Negara (*beschikking*). Para serjana hukum menggunakan istilah yang berbedada-beda untuk menegartikan

³⁶Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Rarajawali Perst 2018), h. 169

³⁷Adi Condro Bawono, Prbedaan Keputusan Dengan Penetapan, artike diakses pada 19 Februari 2018 dari hukum online.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beschikking E. Ultrect menyebutkan bahwa ketetapan sedangkan Prajudi menyebutkan penetapan. Menurut prints adalah suatu tindak hukum sepihak di bidang pemerintah dilakukan oleh alat-alat pengusaha berdasarkan kewenangan khusus. Sedangkan menurut van vaholen berpendapat bahwa penetapan/keputusan yang bersifat legislative yang mempunyai arti berlainan.

Ada beberapa unsur-unsur ketetapan yang terdapat di dalam *beschikking* yaitu : penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, berisi tindakan hukum dalam bidang tata usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret individual dan pinal, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bedasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan perizinan usaha pengoperasian pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010 Tentang Angutan Di Perairan, di danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar maka dapat dijelaskan bahwa.

Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah atau sering di bilang dengan (*beschikking*).³⁸ Izin adalah perbuatan hukum Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan undang-undang. Bagaimana menyebut izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum berdasarkan undang-undang. Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu

³⁸Ridwan Juniarso, *Hukum Administrasi Negara*, (Ujung Berung:Nuansa, 2012), h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk di tetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Sedangkan menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh bachsan Mustafa yaitu bilamana pembuatan peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, dan juga memperkenankan diadakannya secara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.

Perizinan adalah menurut KBBI dalam pengertian umum berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb): persetujuan membolehkan. Sedangkan berdasarkan pelaksanaan izin lingkungan sesuai dengan makna pasal 1 angka 35, bahwa, izin lingkungan adalah izin yang diberikan konsep setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau uk-pkl dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/kegiatan.³⁹

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintahan dalam hal-hal tertentu berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik orang yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Dengan melalui perizinan pemerintah terlibat kegiatan warga negaranya. Artinya dengan terlibatnya pemerintah dengan kegiatan warga negaranya tidak lepas kontrol dalam tindakan warga-warga Negara. Keterlibatan pemerintah dalam masyarakat

³⁹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkung Hidup*, (Jakarta, Sinar Grafika, :2012), h.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berhenti dalam suatu saat saja melainkan melalui serangkaian kebijakan lainnya atau kebijakan lanjutan dari kebijakan pertama, seprti halnya setelah masyarakat mendapatkan izin.

Beberapa jenis prizinan, Izin berperan sebagai instrument pemerintah yang bersifat yuridis preventive, yang digunakan sebagai serana hukum administrasi untuk mengendalikan prilaku masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ateng Sirafudin membedakan perizinan menjadi 4 macam:

- a. izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang menjadi boleh penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan yang limitative.
- b. dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak dsizinkan, jadi dispensasi hal yang khusus.
- c. izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan perusahaan.
- d. konsesi merupakan izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dengan berkenaan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraanya kepada pemegang izin yang bukan penjabat pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-Unsur Perizinan Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk di terapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.⁴⁰ Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu:

- a. Pertama instrument yuridis dalam melaksanakan tugasnya pemerintah di beri wewenang dalam bidang peraturan, yang fungsi peraturan ini muncul instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan kongkret yaitu yaitu dalam bentuk keputusan.
- b. Peraturan perundang-undangan salah satu prinsip Negara adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Organ pemerintah organ yang menjalankan pemerintahan baik di tingkat pusat Maupun ditingkat daerah.
- d. Peristiwa kongkret instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret individual.
- e. Prosedur dan persyaratan pada umumnya izin harus menempuh prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin.

⁴⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2006), h.201.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hukum Pajak dan Restribusi

1. Pajak

menurut andriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut rochmat soemitro pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra-prestasi, yang dapat langsung ditujukan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Rochmat soemitro menjelaskan bahwa unsur yang dapat dipaksakan artinya bahwa jika hutang pajak tidak dibayar maka hutang pajak tersebut dapat ditagi menggunakan kekerasan seperti menggunakan surat paksa dan melakukan penyitaan, bahkan melakukan penyenderaan. Sementara itu terhadap pembayar pajak tersebut tidak dapat ditujukan jasa timbal tertentu, seperti halnya dan restribusi.

Sedangkan hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kemasyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa kontraprestasi secara langsung kepada individual untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah guna kepentingan umum yang unsur-unsur dari pajak sendiri:

- a. Adanya iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah (Negara);
- b. Dipungut atau dipaksakan berdasarkan undang-undang;
- c. Tanpa adanya kontraprestasi langsung secara individual;
- d. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah guna kepentingan umum.

Sedangkan hukum pajak mempunyai pengertian keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang guna kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan umum. Menurut fungsinya ada dua macam hukum pajak yaitu:

- a. Hukum pajak material, mengatur keadaan, perbuatan hukum yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajakk yag dikenakan segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya pajak, dan hubungan, dan hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak.
- b. Hukum pajak formal, yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum pajak material hukum pajak formal membuat tata cara penetapan pajak terutang, hak-hak fisikus untuk mengawasi wajib pajak dan kewajiban-kewajiban pajak.⁴¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak. Subjek pajak penghasilan, orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.⁴²

Pajak memiliki klasifikasi-klasifikasi yaitu menurut pembebanannya,, pajak menurut sifatnya, pajak menurut pemungutannya, pajak menurut jenis objeknya.

- a. Menurut pembebanannya, pertama pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain, kedua pajak tidak langsung artinya pajak yang akhirnya dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Menurut sifatnya, pertama pajak subjektif yaitu pajak yang didasarkan kepada subjek yang kemudian dicari syarat objektifnya artinya memperhatikan diri wajib pajak. Kedua, pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

⁴¹Djoko Mulyo, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2010), hal 12

⁴²Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta, Rajawali Perst, 2014), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menurut pemugutnya, pertama pajak pusat (Negara) pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk anggaran penyelenggaraan pemerintahan Negara baik pusat maupun Daerah contohnya : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kedua, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah contoh : pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak usaha, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran.
- d. Menurut objeknya, pertama pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam setahun. Kedua pajak penjualan barang mewah, ketiga pajak bumi dan bangunan, keempat bea materai, kelima bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Restribusi

Yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai alat pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Restribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁴³

Berdasarkan fungsi restribusi, restribusi hanya memiliki fungsi mengatur(*fungsi regulerend*) dan fungsi investasi sebagai mana yang terdapat pajak, hal ini berarti bahwa restribusi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagai mana yang dimaksud oleh pemerintah, restribusi hannya semata mata hanya untuk mengisi kas negara maupun daerah.⁴⁴

a. Objek restribusi

Terdapat tiga macam objek restribusi: Pertama. Jasa umum, Kedua. Jasa usaha, Ketiga. Perizinan tertentu. Dan restribusi dibagi atas tiga golongan: Pertama. Restribusi jasa umum, Kedua. Restribusi jasa usaha, Ketiga. Restribusi jasa usaha.⁴⁵

⁴³Djoko Mulyo, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2010), hal 13

⁴⁴Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2014), h. 30

⁴⁵Agus Setiawan Dan Basri Musri, *Perpajakan Umum*, (Jakarta, Pt Grafindo Persada, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Restribusi jasa umum

Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Restribusi jasa usah

Pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip kormesial.

3. Restribusi perizinan tertentu

Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendaliann atau pengawasan kegiatan atas pemamfaatan ruang, penggunaa sumber daya alam, barangg prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

C. Transportasi

Transportasi atau transpor diartikan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Tempat asal merupakan daerah produksi, dan tempat tujuan adalah daerah konsumen (atau pasar) tempat asal dapat pula merupakan daerah perumahan (permukiman), sedangkan tempat tujuannya adalah tempat bekerja, kantor, sekolah, kampus, rumah sakit, pasar, toko,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat pembelanjaan, hotel, pelabuhan, Bandar udara, bandar sebaliknya, yaitu tempat tujuan merupakan tempat asal dan tempat asal merupakan tempat tujuan.⁴⁶

Transportasi adalah sebagai dasar pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian kerja menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. Perkembangan suatu ekonomi suatu Negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam Negara atau bangsa yang bersangkutan.⁴⁷

Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembangi produsen dengan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani pihak pihak yang saling membutuhkan.⁴⁸

Peran penting transportasi dalam kehidupan manusia sudah dirasakan sejak dari dahulu, mulai dari masyarakat primitif hingga zaman moderen sekarang ini. Masyarakat primitif menyusuri sungai menggunakan rakit atau sampan tetapi zaman sekarang ini manusia berhasil mengarungi samudera menggunakan kapal kapal laut berukuran besar dan berkecepatan tinggi. Terdapat

(3) tiga mamfaat jasa tranportasi untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- b. Mamfaat Ekonomi Jasa Transportasi.

⁴⁶ Sakti Adji Adisasmita, *Trasportasi Dan Pengembangan Wilayah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 7.

⁴⁷ Abbas salim, *menajemen transportasi*, (Jakarta, grafinda persada : 2016), h. 6.

⁴⁸ *Obcit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tersedianya transportasi yang cukup (berkapasitas) memberikan mamfaat ekonomi, misalnya : Pertama. Akan memperluas pasar dengan tersedianya trasnportasi yang luas maka pengiriman barang ke berbagai pasar yang jauh letaknya dapat dilaksanakan secara lancar, Kedua, Dapat menstabilkan harga barang, dengan tersedianya fasilitas transportasi yang lancar makanya kekurangan barang di suatu daerah dapat di datangkan barang yang dibutuhkan yang di butuhkan dari daerah lain yang kelebihan barang tersebut, sehingga tingkat harga dari kedua daerah menjadi berkeseimbangan atau menjadi stabil, Ketiga. Tersedianya pelayanan transportasi yang lancar, akan mendorong daerah daerah untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya.⁴⁹

b. Mamfaat Sosial Jasa Transportasi.

Pertama memerikan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan ke berbagai daerah yang tersebar karena sudah terjadinya jaringan jalan yang sudah merata di daerah-daerah pedesahan. Kedua dapat mempererat tali persaudaraan dan hubungan sosial kemasyarakatan antar daerah melalui pekan olaraga, pekan seni kesenian dan kebudayaan. Ketiga dapat membantu daerah yang mengalami bencana alam dan menderita wabah penyakit.

c. Mamfaat Politik/Strategis Jasa Transportasi.

Terwujud jasa transportasi nasional yang efektif dan efisien merupakan fasilitas yang handal, untuk : pertama membasmi segala bentuk gejolak dan gangguan keamanan yang timbul dalam negri, dan kedua menangkal segala

⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk infiltrasi dan gangguan keamanan yang berasal dari Luar Negeri. dan terdapat (2) dua fungsi transportasi dalam pembangunan : fungsi transportasi adalah memindahkan atau mengangkat (barang dan manusia) dari suatu tempat ketempat yang lain, dari tempat asal ke tempat tujuan.

d. Transportasi Merupakan Derived Demand Dan Menciptakan Guna Tempat Dan Guna Waktu.

Transportasi merupakan sektor tersier, yaitu sektor yang menyediakan jasa pelayanan kepada sektor-sektor lain (pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lainnya). Karenah sektor-sektor lain tersebut membutuhkan jasa transportasi mengangkut barang (bahan baku dan hasil produksi) dan manusia (petani, pedagang, karyawan, guru, murid, dokter, wisatawan, dan lainnya) dari tempat asal ke tempat tujuan.⁵⁰

e. Transportasi Berfungsi Sebagai Penunjang Dan Pendorong.

Transportasi sebagai *servicing* sector, yaitu memberikan pelayanan jasa transportasi kepada kegiatan sektor-sektor lain itu yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pelayanan efektif dan efisien itu dinyatakan dalam berbagai mamfaat atau dalam dampak positif yang dirasakan oleh daerah yang dilayani. Misalnya, pembangunan jalan baru yang dihubungkan , yaitu antara daerahh pertanian dengan daerah perkotaan.

⁵⁰ Sakti Adji Sasmita, *Jaringan Transportasi*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2016), H.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan perizinan usaha pengoperasian pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Cara memperoleh perizinan dalam usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan ialah diberikan oleh Kepala Daerah dimana sebelum mengajukan permohonan harus memiliki syarat-syarat seperti : akta pendirian usaha, NPWP, penanggung jawab, tempat usaha, dan pernyataan tertulis memiliki kendaraan perairan seperti pompong. Setelah syarat tersebut terpenuhi maka dilakukanlah pendaftaran yang langkah-langkahnya seperti : pertama, mengajukan permohonan ke *front office*, kedua, pengecekan persyaratan lengkap atau tidak oleh *front office*, ketiga, *beck office* memaraf sertifikat yang dicetak operator, keempat, pemohon menerima tanda terima berkas, kelima, pengecekan oleh kasih penyelenggaraan pelayanan perizinan, keenam, rekom layak diterbitkan izin atau tidak oleh tim teknis, ketujuh, penetapan pajak dan restribusi oleh pejabat penetapan pajak dan restribusi, kedelapan, pembayaran pajak dan restribusi kepada bendahara penerima, kesembilan, pengecekan perizinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh kabid penyelenggaraan pelayanan perizinan, kesepuluh, pengecekan perizinan oleh sekretaris, kesebelas, tanda tangan perizinan oleh kepala badan, keduabelas, penomoran dan diberi stempel perizinan oleh sekretaris, dan yang terakhir, serah terima perizinan dan meminta tanda terima pemohon.

2. Usaha angkutan pompong di danau PLTA Koto Panjang tidak memiliki izin usaha dalam pengoperasiannya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, hal ini dikarenakan ada 4 faktor yang menyebabkannya tidak memiliki izin yaitu : pertama, kurangnya sosialisasi cara mendapatkan perizinan usaha pompong di Danau PLTA Koto Panjang, kedua, proses dalam mendapatkan perizinan, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan keempat, kurangnya sanksi dan pengawasan sebagai efek jera bagi para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha. Karena faktor-faktor tersebut maka menyebabkan tidak berjalanya pajak dan retribusi, karena tidak berjalanya retribusi maka mengakibatkan kurangnya pendapatan di daerah tersebut, karena kurangnya pendapatan daerah akan berimbas kepada pembangunan dan akan sulitnya daerah tersebut untuk berkembang.

B. Saran

1. Pengusaha pompong di danau PLTA koto panjang yang beregerak di bidang angkutan perairan, sebaiknya mengurus perizinan usaha pompongnya karena sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, karna setiap angkutan perairan harus memiliki izin usaha dalam penegoperasiaya maskipun, dinas yang mengurus tentang izin usaha ini tidak memberikan pengawasan atau sanksi, dan diharapkan kesadaran yang berasal dari diri para pengusaha uuntuk mengurus perizinan usaha angkutan perairanya, karena itu merupakan keawajiban kita sebagai warga Negara.

2. Untuk Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar, sebaiknya lebih mengoptimalkan sisosialisasi untuk mengurus perizinan usaha khususnya usaha angkutan perairan. Dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap para pengusaha yang tidak memiliki izin dalam pengoperasiannya, serta memperkuat sanksi bagi usaha, terutama usaha angkutan perairan yang tidak memiliki izin usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Rumoky, Donald, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Perss : 2014)
- Agus Setiawan Dan Basri Musri, *Perpajakan Umum*, (Jakarta, Pt Grafindo Persada, 2006)
- Abbas Salim, *Menajemen Transportasi*, (Jakarta, Grafinda Persada, 2016)
- Ali, Zainudi N, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Abdoel Djamali, *Penghantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009)
- Amiruddin Dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta :Pt. Rajagrafindo Persada, 2004)
- Ubedillah Dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi Ham Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Djoko Mulyo, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2010)
- Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta, Pt Grafindo Persada, 2014)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkung Hidup*, (Jakarta, Sinar Grafika, :2012)
- Jimmy Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Acmad, *Dualise Penelilihan Hukum Normaif Dan Emfiris*, (Yogyakarta, Pustaa Fajar, 2010)
- Lisa Angaini, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press 2014)
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*,(Jakarta, Rajawali Perst,2014)
- Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Perss, 2010),
- Nurul Qamar, *Hak Azazi Manusia Dan Negara Hukum Demokrasi*, (Jawa Timur, Sinar Grafika, 2014)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta :Pt Raja Grapindo Parsada:2006),

Ridwan Jniarso, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung, Nuansa, 2012)

Sakti Adji Adisasmita, *Trasportasi Dan Pengembangan Wilayah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukumn Nomatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012)

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2003)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Wirawan B.Ilyas Dan Richrd Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta Selatan, Selemba Empat, 2013)

B. Undang-Undang

Pembukan Undang-Undang Dasar 1945, Alenia Ke 4.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturann Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

C. Jurnal

Adi Condro Bawono, Prbedaan Keputusan Dengan Penetapan, Artike Diakses Pada 19 Februari 2018 Dari Hukum Online.Com

Ngadino, Agus, Perizinan Dalam Kerangkah Negara Hukum Demokratis, Jurnal Hukum Sriwijaya, Palembang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hernimwati Dan Sudaryanto, Peran Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat XIII Koto Kampar Kabupaten Kmpar, (Pekanbaru, Jurnal Niara, Vol.10 No.2januari 2018),

D. Wawancara

Kidam, Pemuka Adat Desa Tanjung Alai,(Wawancara)30 April 2019

Zulpan Alwi, Kepala Desa Tanjung Alai,(Wawancara) , 5 April 2019

E. Internet

[Http://Www. Pltakotopanjang.Net/Wikipedia/Diaksestanggal](http://Www.Pltakotopanjang.Net/Wikipedia/Diaksestanggal) 1 Mei 2019,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR DATA PRIMER

Rumusan masalah	Data Primer
Cara Memperoleh Perizinan Usaha Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara dengan bapak Djuliandri, Sekretaris Kelompok Usaha Pompong, 25 September 2019. <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha pegoperasian pompong di danau PLTA Koto Panjang, apa sudah memiliki izin atau belum ? (41) Wawancara dengan bapak Hen Karimi, Anggota Kelompok Usaha Popong, 25 September 2019. <ol style="list-style-type: none"> Apakah usaha pengoperasian pompong yang berada di danau PLTA Koto Panjang ini sudah melakukan perizinan /Registrasi di dinas terkait ? (41) Wawancara dengan bapak Marfiar Saputra, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, 28 Oktober 2019. <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana langka-langka /tata cara memperoleh perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? (43)
Faktor-faktor penghambat perizinan usaha pompong berdasarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara dengan bapak Yusuf Sarjono, Kasi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 24 Oktober 2019. <ol style="list-style-type: none"> Sejauhmana pensosialisasian perizinan usaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait usaha-usaha yang tidak memiliki izin, terutama uasaha angkutan di perairan ? (46)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara dengan bapak Syarial, Anggota Kelompok Usaha Pompong, 29 September 2019. <ol style="list-style-type: none"> Apakah pengusaha pompong yang berada di danau PLTA Koto Panjang mengetahui tentang wajibnya melakukan perizinan sebelum beroperasi ? (46) Seberapa sering pensosialisaian yang dilakukan oleh dinas terkait, terutama tentang perizinan usaha angkutan di perairan ? (46) Wawancara dengan bapak Hambali, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 25 Oktober 2019. <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana cara/proses mendapatkan perizinan usaha, terutama usaha angkutan di perairan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar ? (47) Sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha-usaha yang berada di Kabupaten Kampar ? (51) Wawancara dengan ibuk Yurnalis, kasih penyelenggaraan pelyanan perizinan A Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 25 Oktober 2019. <ol style="list-style-type: none"> Bagaimanaproses mendapatkan perizinan di Dinas Penanaman
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar ? (47)</p> <p>2. Sanksi-sanksi apasajakah yang diberikan pihak dinas terkait kepada para pengusaha jika tidak memiliki izin dalam melakukan usaha ? (52)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan bapak Perdy Anggara, Anggota kelompok Usaha Pompong, 1 Oktober 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses mendapatkan prizinan yang pengusaha pompong ke tahui di dinas terkait ? (48) 2. Didalam salah satu proses melakukan perizinan adanya pajak dan redistribusi , bagai mana pendapat para pengusaha dengan pajak tersebut ? (64) • Wawancara degan bapak Rumis Arda, Anggota Kelompok Usaha Pompong, 29 September 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses mendapatkan prizinan yang pengusaha pompong ke tahui di dinas terkait ? (48) • Wawancara dengan bapak Andi Julid, Anggota Kelompok Usaha Pompong, 2 Oktober 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. apakah pengusaha pompong di danau PLTA Koto Panjang mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan ? (49) • Wawancara dengan bapak Aibid Saputra, Anggota Kelopak Usaha Pompong, 2
--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Oktober 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa lama kelompok usaha pompong ini berdiri, sejak kapan tidak memiliki izin ? (49) <ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan ibuk Yesy Anwar, Kasih Pelaporann Dan Evaluasi Peningkat Informasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, 24 Oktober 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa optimalkah dinas terkait dalam menjalankan tugasnya ? (50) 2. Dalam alur dan proses perizinan itu terdapat pajak dan retribusi, apakah pajak ini berjalan dengan semestinya ? (64)
--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar



Foto Alur /Cara Mendapatkan Izin Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Wawancara Dengan Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pada Tanggal 25 Oktober 2019 (Jam 11:00 WIB).



Foto Wawancara Dengan PengusahaPompong Di Danau PLTA Koto Panjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Wawancara Dengan Bapak Djuliandri Selaku Pengusaha Pompong Di Danau PLTA Koto Panjang, Pada Tanggal 25 September 2019 (Jam 16:00 WIB)



Foto Pengecekan Pompong Sebelum Beroperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Darmaga/plabuhan Di Danau PLTA Koto Panjang



Foto Salah Satu Pompong Yang Di Gunakan Untuk Beroperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Pompong Keberangkatan ke Salah Satu Objek Wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA
PENGOPERASIAN POMPONG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NO 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI
PERAIRAN, DI DANAU PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII KOTO
KAMPAR, yang ditulis oleh :

Nama : **Riki Aditia Sintana**
NIM : **11527100055**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, SH., MH

Kepala Subbagian
Akademik Kemahasiswaan
Dan Alumni
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8082/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIKI ADITIA SINTAN
N I M : 11527100055
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 15 AGUSTUS 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 9 Oktober 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 16 TELP. (0762) 322766
 BANGKINANG KOTA 28411

Bangkinang, **31** Oktober 2019

Nomor : 800/DPMTSP/3//.
 Lampiran : -
 Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ilmu Hukum
 UIN SUSKA RIAU
 di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor 070/KKBP/2019/980 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Rekomendasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Prariset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar atas nama :

Nama	: RIKI ADITIA SINTANA
NIM	: 11527100055
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Sehubungan dengan hal tersebut nama siswa diatas telah melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum, Wr. Wb.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KAMPAR



Sekretaris

MARFIZAL SAPUTRA, SE, M.Si

Pembina (IV/a)
 NIP.19770918 200212 1 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/26923
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8062/2019 Tanggal 8 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

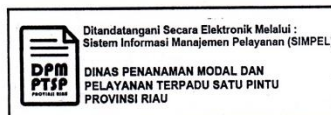
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RIKI ADITIA SINTANA |
| 2. NIM / KTP | : 11527100055 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN DI DANAU PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Oktober 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8062/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Oktober 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIKI ADITIA SINTANA
NIM : 11527100055
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPPTPM) Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan Di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA



Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/980

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/26923 tanggal 21 Oktober 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : RIKI ADITIA SINTANA |
| 2. NIM | : 11527100055 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PENGOPERASIAN POMPONG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN DI DANAU PLTA KOTO PANJANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |
| 8. Lokasi | : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 23 Oktober 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR

Kasi. Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Riki Aditia Sintana**

NIM : **11527100055**

Jurusan : **ILMU HUKUM**

Judul : **Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, Di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar.**

Pembimbing **NUR HIDAYAT, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahril, SH., MH. CPL
NIP: 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RIKI ADITIA SINTIA : lahir di Tanjung Alai (Salah Satu Desa Di Kecamatan XIII Koto Kampar), Pada Tanggal 07 Januari 1997 anak kedua (2) dari empat (4) bersaudara dari pasangan Alimin dan Ibunda Muliati. Penulis memulai Pendidikan SD di SDN 010 Tanjung Alai sampai tahun 2009. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMPN 1 XIII Koto Kampar dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN SMAN 1 XIII Koto Kampar pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil S1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah melaksanakan magang selama 2 bulan di kantor BPN (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru). Selain itu penulis juga pernah melaksanakan KKN di Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan lesung, Kabupaten Pelalawan selama 45 hari. Kemudian pada Tahun 2019 penulis yang akrab disapa Riki ini memulai sebuah penelitian sosiologis dengan mengangkat sebuah judul skripsi: **“Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengoperasian Pompong Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, Di Danau PLTA Koto Panjang Kecamatan XIII Koto Kampar”** yang di bimbing langsung oleh bapak Nur Hidayat, SH., MH Berdasarkan hasil sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum pada Jum'at tanggal 27 Desember 2019, penulis dinyatakan **LULUS** serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).